

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6
TAHUN 2015 TENTANG PENERAPAN LARANGAN
DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Oleh:

EKA LESTARI

1803100072

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Kebijakan**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2024

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh :

Nama : EKA LESTARI
Npm : 1803100072
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, Tanggal : KAMIS, 30 Mei 2024
Waktu : 08.00 WIB s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : DEDI AMRIZAL, S.Sos.,M.Si

(.....)

PENGUJI II : KHAIDIR ALI, S.Sos.,M.PA.

(.....)

PENGUJI III : IDA MARTINELLY, SH.,MM

(.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris


Dr. ARIFIN SALEH, S.SOS., MSP.



Dr. ABRAR ADHANI, S.SOS., M.IKOM

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



Telah selesai diberikan Bimbingan dalam penulisan Skripsi sehingga naskah Skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian Skripsi Oleh :

Nama Mahasiswa : EKA LESTARI
Npm : 1803100072
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6
TAHUN 2015 TENTANG PENERAPAN LARANGAN DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
DI KOTA MEDAN

Medan, 20 MEI 2024

PEMBIMBING

IDA MARTINELLY, SH.,MM

Disetujui Oleh :

KETUA PROGRAM STUDI

ANANDA MAHARDIKA S.SOS., M.SP.

DEKAN



DR. ARIEN SALEH, S.SOS., M.SP.

SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya Eka Lestari NPM 1803100072 Menyatakan dengan sungguh –
sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang – undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil atau menjiplak karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang – undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau jiplakan karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah diajukan untuk memperoleh di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bahwa kemudian terbukti saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya beserta nilai-nilai dan hasil ujian saya ~~dibatalkan~~.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah diperoleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Mei 2024

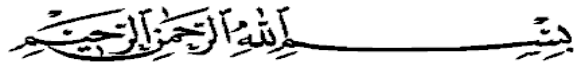
Yang menyatakan,



EKA LESTARI

1803100072

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah *rabbi* *alamin*, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihan, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan strata-1 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Adapun judul skripsi ini adalah **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penerapan Larangan Dalam Pengelolaan Persampahan Di Kota Medan”**.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Pungut dan Ibunda Sulistiati yang telah memberikan kekuatan moral dan psikis kepada saya dalam menjalani pendidikan dan kehidupan dari masa kecil hingga

sampai sekarang ini. Maka dari itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dra. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika , S.Sos., M.SP, selaku Kepala Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Ida Martinelli, S.H.,M.M selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, motivasi dan waktu selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Dosen dan seluruh staff pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
8. Seluruh pegawai staff biro yang telah banyak membantu dalam semua urusan penulis mulai dari perkuliahan sampai akhir pengerjaan skripsi penulis.
9. Kepada saudara sekandung penulis yang telah memberikan semangat dukungan, dan do'a serta membantu penulis tanpa hentinya.

10. Kepada teman-teman seperjuangan Juju, Fani yang sudah membantu dan menyemangati penulis untuk mengerjakan skripsi yang sama-sama berjuang meraih jenjang sarjana dan teman-teman yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhirnya kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapatkan balasan dari Allah SWT serta tidak lupa penulis memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan selama penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi siapa saja yang membacanya demi kemajuan pendidikan dan lebih baik lagi untuk kedepannya Aamiin ya rabbal'alam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, 10 Mei 2024

Penulis

Eka Lestari

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 6 TAHUN 2015 TENTANG PENERAPAN LARANGAN DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI KOTA MEDAN

OLEH:

EKA LESTARI

1803100072

Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang terdiri dari atas pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan dan pembuangan. Penelitian ini dilakukan di TPA Terjun Marelان. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penerapan Larangan Dalam Pengelolaan Persampahan Di Kota Medan. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan pengamatan, wawancara dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta Nampak atau sebagaimana adanya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penerapan Larangan Dalam Pengelolaan Persampahan Di Kota Medan sistem yang digunakan sudah terimplementasi, namun belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dikarenakan informasi dalam bentuk sosialisasi langsung secara meluas terhadap masyarakat, dan juga mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah dan membuang sampah tidak di sembarang tempat agar menjaga kebersihan dan keamanan. Pelaksanaan disposisi yang ada di TPA Terjun Marelان sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dan sudah berjalan dengan efektif. Struktur birokrasi yang ada di TPA Terjun Marelان sudah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Kata Kunci : Implementasi, Pengelolaan Sampah.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Penelitian	5
1.3.2 Manfaat Penelitian	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II	7
URAIAN TEORITIS	7
2.1 Implementasi	7
2.2 Implementasi Kebijakan Publik	9
2.3 Faktor Faktor Implementasi Kebijakan Publik	10
2.4 Pengelolaan	14
2.5 Sampah	15
BAB III	17
METODE PENELITIAN	17
3.1. Jenis Penelitian	17
3.2. Kerangka Konsep	17
3.3. Definisi Konsep	19
3.4. Kategorisasi	19
3.5. Narasumber	20
3.6. Teknik Pengumpulan Data	21
1). Data Primer	21

2). Data Sekunder	21
3.7. Teknik Analisis Data	22
1. Reduksi Data	22
2. Penyajian Data	22
3. Penarikan Kesimpulan	22
3.8. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	22
3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian.....	23
3.9.1 Sejarah Singkat TPA Terjun	23
3.9.2 Visi Dan Misi TPA Terjun	24
3.10. Struktur Organisasi	25
BAB IV.....	26
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
4.1 Hasil Penelitian	26
4.2 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi	26
4.2.1 Adanya Komunikasi Tentang Pengelolaan Persampahan	26
4.2.2 Adanya Sumber Daya Manusia Tentang Pengelolaan Persampahan.....	28
4.2.3 Adanya Disposisi Dalam Pengelolaan Persampahan.....	29
4.2.4 Adanya Struktur Birokrasi Tentang Pengelolaan Persampahan.....	31
4.3 Pembahasan.....	32
a. Adanya Komunikasi Tentang Pengelolaan Persampahan	32
b. Adanya Sumber Daya Manusia Tentang Pengelolaan Persampahan	34
c. Adanya Disposisi Dalam Pengelolaan Persampahan	34
d. Adanya Struktur Birokrasi Tentang Pengelolaan Persampahan	36
BAB V	38
PENUTUP	38
5.1. Kesimpulan.....	38
DAFTAR PUSTAKA.....	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: SK-I Permohonan Penetapan Judul
Lampiran II	: SK-II Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
Lampiran III	: SK-III Surat Permohonan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran IV	: SK-IV Undangan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran V	: SK-V Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran VI	: Surat Izin Penelitian Universitas
Lampiran VII	: Surat Bebas Pinjaman Buku Perpustakaan
Lampiran VIII	: Dokumentasi
Lampiran IX	: Draft Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sampah merupakan sisa padat kegiatan manusia sehari-hari atau proses alam jika sampah tidak dikelola secara efektif, maka akan berdampak negatif bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Sampah telah menjadi masalah di daerah setempat atau pedesaan yang seolah-olah tidak ada jalan keluarnya. Di satu sisi sampah barang yang tidak bernilai ekonomis, sedangkan di sisi lain ada pihak yang menganggap sampah sebagai barang berharga yang bisa dijual kepada pengepul.

Pengelolaan sampah yang dihasilkan masyarakat akan dialirkan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Meskipun strategi pengurangan sampah telah dilaksanakan, namun masyarakat dan pemerintah harus terus mengatasi masalah sampah, khususnya dalam hal penyediaan sarana dan prasarana. Dapat mencakup semua dan berkelanjutan agar sampah berkurang dan juga penanganan sampah yang baik bertujuan dapat meningkatkan kesehatan bagi masyarakat dan juga bagi lingkungan, serta mampu menjadikan sampah sebagai sumber daya yang dapat diambil manfaatnya. Daur ulang dan memanfaatkan kembali sampah atau yang dikenal dengan sebutan 3R yaitu *reduce*, *reuse* dan *recycle*, yang telah sesuai dengan kemajuan zaman dengan sistem pengelolaan sampah yang berlanjut dengan menggunakan penggabungan 3R. Kegiatan penanganan sampah meliputi:

1. Pemilahan dalam bentuk kelompok dan akan dipisah yang sesuai jenis, banyaknya sampah dan sifat dari sampah itu sendiri.
2. Mengumpulkan sampah yang diambil dan dipindah dari tempat pembuangan sementara.
3. Sampah diangkut dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir sampah.
4. Sampah kemudian dikelola.
5. Tahap akhir, pengembalian residu dari hasil pengolahan sampah yang telah dikelola sebelumnya ke lingkungan dengan cara yang aman.

Meningkatnya jumlah suatu penduduk dan laju pertumbuhan ekonomi serta pembangunan, tidak hanya membawa dampak yang positif bagi perubahan ekonomi. Namun juga membawa dampak yang negatif bagi masyarakatnya misalnya, rusaknya lingkungan hidup karena masalah sampah. Dengan situasi tersebut, pemerintahan di kota-kota besar di Indonesia mulai mencari solusi dalam menangani permasalahan tersebut sebagai salah satu aspek yang mampu mengurangi dampak negatif dari minimnya pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan sampah telah menjadi masalah yang serius, beberapa titik baik berada di kawasan kota maupun pinggiran kota medan dan masih banyak juga yang membuang sampah sembarangan seperti di tepi sungai dan pinggir jalan terlihat ada tumpukan sampah. Untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan Pasal 32:

“Setiap orang atau badan dilarang: a) Membuang sampah sembarangan, b) Menyelenggarakan pengelolaan persampahan tanpa seizin walikota, c) Menimbun sampah yang berakibat kerusakan lingkungan.”

1. Masih banyak disekitar TPA masyarakat yang membuang sampah sembarangan seperti dipinggir jalan atau pun sungai.
2. Membuat pengelolaan sampah TPA tanpa meminta izin walikota
3. Semakin banyak sampah plastik yang di daur ulang akan mengakibatkan kerusakan dan mengganggu sekitar masyarakat.

Permasalahan tersebutlah yang menjadikan Pemerintah Kota Medan mulai mencari solusi yang lebih baik dan sesuai standar yang berlaku serta memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat yaitu lewat metode Sistem Pengelolaan Sampah Sanitary Landfill agar segera berjalan dengan baik. Meskipun TPA Terjun menerapkan UU Open Dumping, mereka telah melakukan inovasi dengan menjalin kerjasama yang menarik dengan PLTU Pangkalan Susu. Melalui kerjasama ini, TPA Terjun berhasil mengirim hingga 20 ton sampah organik ke PLTU Pangkalan Susu dalam satu pengiriman, dengan tujuan mengurangi ketinggian tumpukan sampah di TPA. Diharapkan mampu menangani masalah dalam penerapan sistem dasar yang sesuai dengan standar di Indonesia dalam pengelolaan sampah.

Penanganan serta metode open dumping tidak lagi direkomendasikan oleh pemerintah karena sistem ini mengakibatkan pencemaran air dan tanah karena cairan lindi serta berkembang biaknya binatang seperti tikus, kecoa, lalat dan nyamuk bisa membahayakan warga sekitar dan tak mudah menimbulkan penyakit. Karena itu

pemerintah menyarankan TPA untuk menggunakan sistem sanitary landfill, sistem ini dinilai paling efektif mengurangi pencemaran lingkungan dan meminimalisir dampak pencemaran, baik air, tanah, maupun udara sehingga lebih ramah lingkungan.

Nyatanya di TPA Terjun banyak ditemukan puluhan pemulung yang memilah sampah yang nantinya akan dijual mereka kepada pengepul sampah. Saat ini kondisi TPA Terjun sangat mengkhawatirkan dimana terdapat gunung sampah yang sangat tinggi atau ketinggian 50m, kemudian dari jarak 100 M dari TPA ini sudah mulai tercium aroma yang tidak sedap dan jika musim kemarau banyak abu di sekitar TPA yang mengganggu pernafasan dan menyebabkan sakit mata bagi masyarakat.

Upaya tersebut dapat menanggulangi kerusakan dan bahaya yang diakibatkan oleh sampah melalui penyediaan TPA yang merupakan sarana fisik berakhirnya suatu proses pengolahan sampah yang dapat dikurangi dan juga dapat di daur ulang. Produksi limbah padat dari pusat populasi dengan kepadatan tinggi menciptakan masalah dalam manajemen suatu kota.

Berdasarkan data yang didapat oleh penulis di TPA, sampah yang masuk dan yang dikelola adalah 2.850 ton perharinya dan 796.386,015 ton pertahunnya, Oleh karena itu, harus didukung dengan sistem pengelolaan sampah yang sesuai. Secara historis, Kota Medan memiliki dua (dua) TPA ialah TPA Terjun di Medan Utara dan TPA Namo Bintang di Medan Selatan. TPA Terjun yang berada di Kecamatan Medan Marelan ini ialah satu-satunya TPA yang masih beroperasi hingga saat ini.

Meskipun pemerintah atau pihak berwenang telah menciptakan sistem pengelolaan sampah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015, kenyataan di lapangan

sangat berbeda karena seringkali tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan juga tidak diharapkan dapat disimpulkan bahwa sistem pengelolaan sampah yang belum berjalan dengan baik di Kota Medan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, permasalahan inilah yang membuat penulis tertarik mengambil judul penelitian untuk mengetahui **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penerapan Larangan Dalam Pengelolaan Persampahan Di Kota Medan”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penerapan Larangan Dalam Pengelolaan Persampahan Di Kota Medan?”.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penerapan Larangan Dalam Pengelolaan Persampahan Di Kota Medan”.

1.3.2 Manfaat Penelitian

- a) Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan karya ilmiah di bidang ilmu administrasi publik.
- b) Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi penelitian mahasiswa selanjutnya di masa depan.

- c) Manfaat akademis, hasil dari penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis dan konsisten agar dapat melihat dan mengkaji dari penelitian secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara sub bab dengan bab yang lainnya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II URAIAN TEORITIS

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Pengertian Implementasi, Pengertian Implementasi Kebijakan Publik, Pengertian Pengelolaan, Pengertian Sampah.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Kategorisasi, Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Waktu dan Lokasi Penelitian, Deskripsi Ringkas Objek Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai hasil penelitian di lapangan dan pembahasan dari hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini mengenai simpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang–undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga–lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Pendapat yang dikemukakan Webster yang dikutip oleh Abdul Wahab (2004:64). Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Menurut Dunn dalam (Purwanto dkk., 2019:132) implementasi merupakan tindakan–tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah maupun swasta. Dunn mengistilahkannya implementasi secara lebih khusus, menyebutkan dengan istilah implementasi kebijakan dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik. Untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to delivery policy output*) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya mewujudkan tujuan kebijakan.

Menurut Guntur (2018:39) Implementasi adalah suatu perluasan yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Mulyadi (2019:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Menurut Friedrich Nugroho (2020:126), menyatakan bahwa serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkup lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakan yang diusulkan tersebut ditunjukkan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli pengertian implementasi, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah proses yang dilakukan apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan dan telah siap untuk dilaksanakan. Serta Adanya tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

2.2 Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Nugroho dalam (Mustopadidjaja dkk., 2018:112) Implementasi kebijakan publik adalah satu tahapan kebijakan publik, antea pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan baik, mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplentasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan. Suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah

Sementara menurut Tachjan (2018) bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika top-down, maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro.

Menurut Dwijowijoto menyatakan bahwa implementasi kebijakan public pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu: a). langsung mengiimplementasikan dalam bentuk sosialisasi, b). melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan public tersebut.Sementara itu menurut

Mustopadidjaja Implementasi kebijakan public adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah. Kemudian menurut Menurut Van Meter dan Horn (Naditya dkk, 2013), mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai: Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Selanjutnya menurut (Aneta, 2010) mengemukakan implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan publik serta dapat diterima publik. Dalam hal ini dapat ditekankan bahwa bisa saja dalam tahapan perencanaan dan formulasi kebijakan dilakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi jika pada tahapan implementasinya tidak diperhatikan optimalisasinya maka tidak akan jelas apa yang diharapkan dari sebuah produk.

Berdasarkan uraian berbagai pendapat para ahli pengertian implementasi kebijakan publik, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses yang dilakukan setelah kebijakan telah diterapkan dengan tujuan mengatasi suatu permasalahan yang muncul dalam suatu kebijakan dan adanya proses kegiatan administrative yang dilakukan setelah ketetapan ditetapkan dan disetujui.

2.3 Faktor Faktor Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Edward III dalam Agustino (2016), adalah meliputi dimensi dimensi sebagai berikut: a. Komunikasi, dengan indikator-indikator, b. Sumber daya, dengan

indicator indikator, c. Disposisi atau sikap pelaksana, dengan, d. Struktur birokrasi, dengan indikator-indikator.

1) Komunikasi (communication)

Faktor pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, menurut Edward III dalam Agustino (2006:150), yaitu komunikasi. Komunikasi menurutnya lebih lanjut sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik, implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat.

Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikanpun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

2) Sumber daya

Faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya, Edward III dalam Agustino (2006:151) mengimplementasikan kebijakan sumber daya terdiri dari beberapa elemen yaitu:

- 1) Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebagikan

oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya.

- 2) Informasi, dalam implementasi kebijakan informasi mempunyai dua bentuk yaitu, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan.
- 3) Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3) Disposisi

Faktor ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik bagi Edward III dalam Agustino (2006:152), adalah disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah factor penting ketiga dalam pendekatan mengenai melaksanakan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Hal yang perlu dicermati pada variable disposisi adalah. Pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan

haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan lebih khusus lagi pada kepentingan warga.

4) Stuktur Birokrasi

Menurut Edward III dalam Agustino (2008:153), yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia maka hal ini akan menyebabkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Dua karakteristik yang dapat membantu kinerja struktur birokrasi/ organisasi kearah yang lebih baik, adalah:

- a. Standar Operating Prosedure (SOP), suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (pelaksana kebijakan/administrasi birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (standar minimum yang dibutuhkan).
- b. Melaksanakan fragmentasi, upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

Menurut Cheema, dkk mengidentifikasi 4 (empat) faktor yang mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung dalam mengimplementasikan kebijakan publik:

- a) Kondisi lingkungan, Dalam merealisasikan implementasi kebijakan publik lingkungan merupakan Faktor utama yang menjadi patokan keberhasilan kebijakan publik.,
- b) Hubungan antar organisasi, implementasi kebijakan public tidak akan terlaksana apabila kurangnya sinergitas antara organisasi yang mempunyai wewenang di kebijakan publik.,
- c) Sumberdaya organisasi untuk implementasi program, implementasi akan terlaksana dengan baik apabila fasilitas yang didapat mendukung
- d) Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana , meskipun ketiga faktor diatas terpenuhi tetapi agen pelaksana kurang berpengalaman di bidangnya maka kebijakan publik tidak akan terealisasi sebagaimana yang diharapkan.

Menurut Goggin, keberhasilan Implementasi kebijakan Publik dipengaruhi oleh 3 pokok yaitu:

1. Isi kebijakan meliputi sumber daya, manfaat kebijakan serta keterlibatan publik
2. Format kebijakan terdiri dari kejelasan kejelasan kebijakan, konsistensi kebijakan serta penerimaan isi kebijakan
3. reputasi aktor terdiri dari legitimasi dan kredibilitas actor-aktor pemerintah

2.4 Pengelolaan

Menurut Salim (2021) Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam

pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.

Adisasmita (2019:22) mengemukakan bahwa, “Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.”

Menurut Balderton (2018:231), istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.

Berdasarkan pandangan para ahli pengertian pengelolaan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi merencanakan, mengorganisasikan dan mengarahkan, dan mengawasi kegiatan manusia dengan memanfaatkan material dan fasilitas yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

2.5 Sampah

Menurut Chandra dalam (Cecep Dani dkk., 2019) definisi World Health Organization (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. bentuk barang padat atau cairan yang dibuang karena dianggap sudah tidak berguna lagi yang berasal dari perorangan, rumah tangga, perusahaan, kantor-kantor dan tempat lainnya yang pasti menimbulkan sampah.

Selain itu Notoatmodjo (2018:187) mendefinisikan sampah adalah sesuatu bahan atau benda padat yang sudah tidak dipakai manusia, atau benda padat yang sudah digunakan lagi dalam suatu kegiatan manusia dan dibuang. Para ahli kesehatan masyarakat Amerika membuat batasan, sampah (waste) adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang, yang berasal dari kegiatan manusia, dan tidak terjadi dengan sendirinya. Dari batasan ini jelas bahwa sampah adalah hasil kegiatan manusia yang dibuang karena sudah tidak berguna. Dengan demikian sampah mengandung prinsip sebagai berikut :

- a) Adanya sesuatu benda atau bahan padat
- b) Adanya hubungan langsung/tidak langsung dengan kegiatan manusia

Menurut Sucipto (2021:1) sampah adalah bentuk barang padat atau cairan yang dibuang karena dianggap sudah tidak berguna lagi yang berasal dari perorangan, rumah tangga, perusahaan, kantor-kantor dan tempat lainnya yang pasti menimbulkan sampah.

Berdasarkan pandangan para ahli pengertian sampah, dapat disimpulkan bahwa sampah merupakan sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih dapat di daur ulang menjadi barang yang bernilai. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

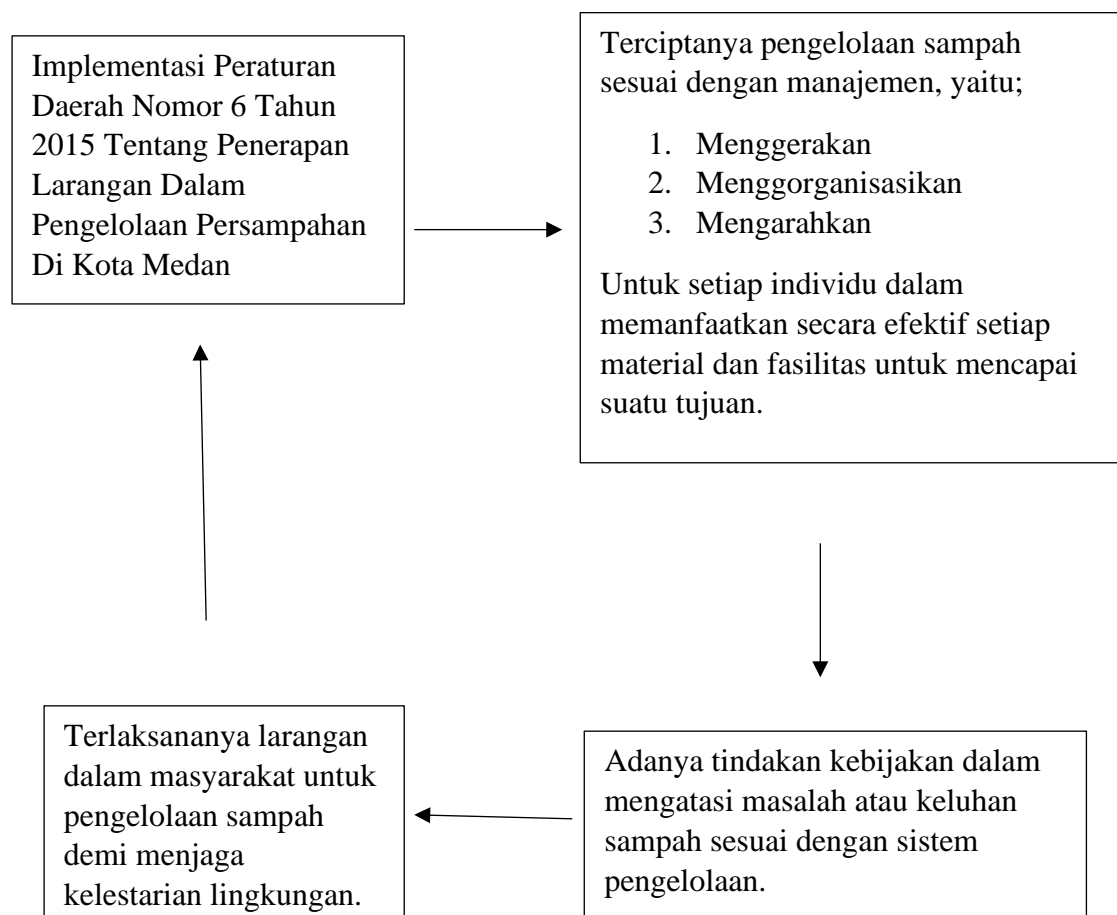
Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara pengamatan, wawancara dengan cara menggambarkan keadaan dari objek penelitian yang sedang berlangsung berdasarkan fakta-fakta yang terlihat secara langsung maupun tanggapan masyarakat yang sebagaimana adanya.

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dengan analisis data bersifat kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk menggambarkan, menjawab dan menjelaskan pada permasalahan yang terjadi dengan lebih jelas dan terperinci. Dalam penelitian ini analisis data kualitatif merupakan instrumen penelitian dan hasil penulisannya berupa pernyataan atau kata-kata yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (Sugiyono, 2016).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif dengan analisis data yang bersifat kualitatif merupakan teknik analisis data yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan pokok dari objek penelitian untuk mencapai tujuan berupa jawaban atau hasil dari permasalahan dengan keadaan yang sebenar-benarnya.

3.2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep dibuat untuk mempermudah penyusunan skripsi dan menjadikan penilaian dalam penelitian lebih sistematis. Dalam pelaksanaan penelitian, kerangka konsep dibuat agar penelitian menjadi lebih terarah.



3.3. Definisi Konsep

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Definisi konsep merupakan gambaran atau rancangan yang telah dipikirkan matang-matang. Rancangan tersebut dibuat sebagai perencanaan yang mudah dipahami dan dimengerti agar segala kegiatan berjalan dengan sistematis dan lancar.

Berkaitan dengan definisi dari konsep diatas, maka dalam penelitian ini, digunakan konsep-konsep sebagai berikut:

- a. Implementasi adalah proses yang dilakukan apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan dan telah siap untuk dilaksanakan. Serta Adanya tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
- b. Penerapan Larangan adalah suatu perbuatan mempraktekkan bagian kaidah aturan yang melakukan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan.
- c. Pengelolaan Persampahan adalah sesuatu kebijakan pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus daerahnya dengan pelaksanaan penerapan peraturan yang dibuat bersama Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dalam hal persampahan.

3.4. Kategorisasi

Kategorisasi merupakan penyusunan berdasarkan kategori atau penggolongan dengan maksud untuk mengukur suatu variabel dalam suatu penelitian, sehingga dapat diketahui dengan jelas hubungan antara subjek dengan objek yang diteliti. Kategorisasi dalam penelitian ini menurut George C. Edward III adalah, sebagai berikut:

- a. Adanya Komunikasi tentang pengelolaan persampahan
- b. Adanya Sumber daya manusia tentang pengelolaan persampahan
- c. Adanya Disposisi dalam pengelolaan persampahan
- d. Adanya Struktur Birokrasi tentang pengelolaan persampahan

3.5. Narasumber

Narasumber merupakan suatu individu atau seseorang yang memberikan suatu informasi. Informasi tersebut didapatkan berdasarkan opini atau pendapat dari orang yang mengetahui informasi tersebut dan diambil melalui wawancara.

Adapun dalam penelitian ini yang akan menjadi narasumber adalah sebagai berikut:

1. Kepala TPA Terjun Kecamatan Medan Marelan

Nama : Zulkifli

Jabatan : Kepala TPA Terjun

Pendidikan : SMA

2. Staff Lapangan TPA Terjun Kecamatan Medan Marelan

Nama : Jamaluddin

Jabatan : Staff Lapangan TPA Terjun

Pendidikan : SMA

3. Sekretaris Kantor TPA Terjun Kecamatan Medan Marelan

Nama : Dara Putri

Jabatan : Sekretaris Kantor TPA

Pendidikan : S1

4. Staff Keamanan di TPA Terjun Kecamatan Medan Marelan

Nama : Junaidi

Jabatan : Keamanan di TPA

Pendidikan : SMA

3.6. Teknik Pengumpulan Data

1). Data Primer

Data primer adalah pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dilapangan atau tempat penelitian melalui observasi dengan cara melakukan tanya jawab atau wawancara sesuai dengan indikator yang akan diteliti.

2). Data Sekunder

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data yang didapatkan dari menghimpun dan menganalisi dokumen-dokumen baik secara tertulis maupun tidak tertulis, buku, maupun yang berhubungan dengan masalah atau penelitian yang akan diteliti. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan membentuk suatu kajian yang sistematis.

3.7. Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data

Mereduksi data yakni merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada poin-poin penting, dicari tema dan polanya, dengan demikian data yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data

Setelah direduksi, selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data akan mempermudah peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahap untuk memberikan makna atau inti pada data, lalu dilakukan konfirmasi apakah makna atau inti yang telah diberikan sudah tepat dan terakhir akan dilakukan verifikasi untuk kembali memastikan apakah data yang diberikan sudah sesuai.

3.8. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang akan dilakukannya penelitian dalam mencari dan mengumpulkan data yang akan dibutuhkan saat melakukan penelitian.

Waktu pelaksanaan selama 1 bulan dan penelitian ini berlokasi di Jalan Kapten Rahmad Buddin Lingkungan 01 Kelurahan Paya pasir Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan.

3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

3.9.1 Sejarah Singkat TPA Terjun

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) merupakan tempat krusial di suatu daerah karena menjadi media pengembalian sampah ke lingkungan asalnya. Singkatan TPS dan TPA muncul dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah dan beberapa peraturan menteri lingkungan hidup dan menteri pekerjaan umum yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah.

TPA Terjun mulai dioperasikan pada tanggal 7 Januari 1993, yang berlokasi di Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan dengan luas lokasi 14 Ha dan Pemilikan Lahan Pemerintah Kota Medan. Sementara truk sampah hilir mudik setiap menit untuk mengangkut sampah ke TPA. Sebanyak dua ekskavator juga dioperasikan untuk menumpuk dan menyebarkan sampah di TPA. TPA terjun memiliki luas lahan 14 Ha dengan dulu nya sistem pengelolaan sampah yang dilakukan yakni sistem open dumping. Sistem open dumping adalah pengelolaan sampah yang dilakukan dengan cara pemerataan dan pemaparan sampah. Sistem open dumping sudah tidak diperbolehkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup karena dampaknya tidak baik bagi Lingkungan. Di mana air lindih hasil pengelolaan sampah dapat mencemarkan tanah dan air di sekitar TPA dan banyaknya sumber penyakit yang disebarkan oleh lalat-lalat yang hinggap di

TPA. Saat ini sistem yang mereka gunakan tidak lagi open dumping yakni sistem sanitary landfill dan sudah mulai tertata nya taman di dalam pengelolaan sampah agar masyarakat sekitar bisa berkunjung atau bersantai setiap sore nya.

3.9.2 Visi Dan Misi TPA Terjun

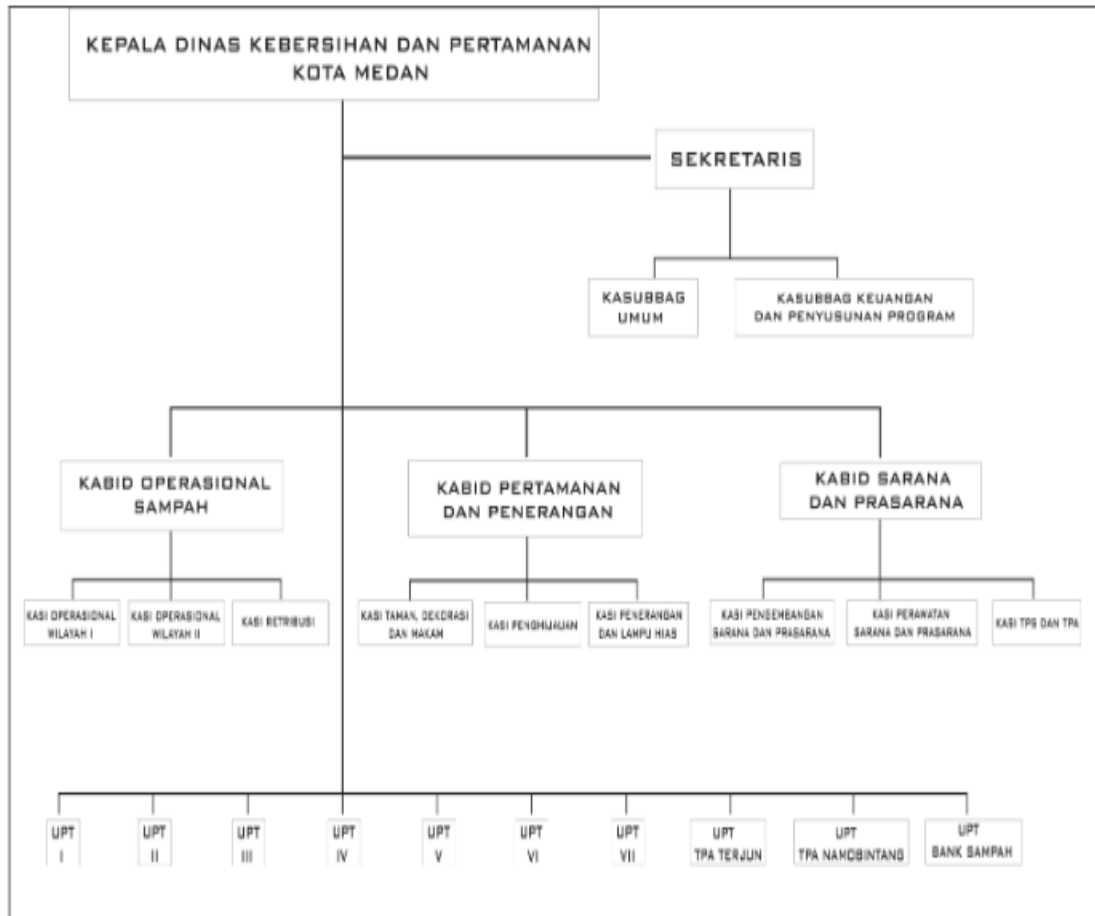
Visi :

Pengelolaan Sampah di TPA Terjun dapat menjadikan tempat pembuangan sampah yang semakin berkualitas bisa meningkatkan kebersihan di kota medan, dan dapat mewujudkan lingkungan yang sehat bagi masyarakat sekitar.

Misi :

1. Mengurangi timbunan sampah dalam rangka pengelolaan persampahan yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan sistem pengelolaan persampahan
3. Meningkatkan tatakelola kebersihan dan ruang terbuka hijau di kawasan TPA Terjun.

3.10 STRUKTUR ORGANISASI INSTANSI



3.10. Gambar Struktur Organisasi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis akan membahas dan menyajikan data yang telah didapat dari hasil yang telah diperoleh dari penelitian di lapangan. Metode penelitian yang digunakan selama proses pengumpulan data adalah dengan bentuk observasi, wawancara serta dokumentasi yang dilakukan dengan cara menggambarkan objek penelitian yang sedang berlangsung berdasarkan fakta-fakta yang terlihat di lapangan. Data yang diperoleh melalui penelitian ini diambil untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang Penerapan Larangan Dalam Pengelolaan Persampahan Di kota Medan dan kemudian akan dianalisis untuk menarik kesimpulan yang sebagaimana adanya. Berikut adalah penyajian data yang telah didapatkan dari hasil wawancara yang telah berlangsung di TPA Terjun yang menjadi jawaban atas fenomena yang telah disebutkan oleh penulis.

4.2 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi

4.2.1 Adanya Komunikasi Tentang Pengelolaan Persampahan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap Bapak Zulkifli, Selaku Kepala TPA Terjun pada tanggal 05 Februari 2024. Yang mengatakan bahwa program sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk menjaga lingkungan, dan mengelola sampah dengan benar. Menurutnya selama ini mungkin saja masyarakat belum begitu tahu bahwa ada aturan tentang sampah, serta

banyak solusi untuk mengatasi persoalan sampah. Dinas lingkungan hidup menginginkan agar masyarakat dapat mengenal pentingnya menjaga lingkungan.

Hasil wawancara berikutnya dengan Bapak Jamaludin bentuk sosialisasi kepada masyarakat berupa pemilahan sampah seperti bank sampah, masyarakat harus bisa membedakan sampah yang organik dan non organik. Sampah ini sangat penting meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan. Pengelolaan sampah yang buruk seperti sampah organik dapat mengakibatkan penyebaran penyakit jika sudah membusuk. Sementara, sampah anorganik seperti plastik tidak mudah terurai dan dapat berkontribusi pada masalah pemanasan global.

Wawancara selanjutnya dengan Ibu Dara Putri larangan pengelolaan sampah yaitu banyak masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan langsung ke lingkungan merupakan menjadi tantangan pengelolaan sampah di Indonesia. Kebiasaan ini memang membutuhkan upaya peningkatan masyarakat dari usia dini, bahwa jenis sampah yang dihasilkan memiliki karakteristik yang berbeda dengan jenis sampah yang dihasilkan oleh generasi sebelumnya. Sikap masyarakat yang kurang terbuka dalam menghadapi perubahan, masyarakat pedesaan sering dihadapan pada perubahan yang tidak mereka mau. Untuk membiasakan diri buang sampah tidak di sembarang tempat lagi, pemerintah membuat TPA agar masyarakat dapat membuang sampah tidak di sembarang tempat.

Berikutnya dengan Bapak Junaidi yang mengatakan sosialisasi yang digunakan tidak ada kendala, tetapi masyarakat masih tidak peduli dengan hal sampah yang mereka

gunakan sehari-hari. Semakin banyak sampah yang mereka buang sembarangan bisa menyebabkan pencemaran lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan narasumber terkait dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan dengan sosialisasi terhadap masyarakat bertujuan untuk mengubah pola pikir masyarakat dalam menjaga kesehatan dan juga dalam pengelolaan sampah yang berasal dari lingkungan rumah tangga. Pentingnya kegiatan seperti ini sehingga masyarakat yang kurang sadar dan paham dalam menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungannya jadi tahu menjaga kebersihan diri sendiri dan juga lingkungan sekitar.

4.2.2 Adanya Sumber Daya Manusia Tentang Pengelolaan Persampahan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap Bapak Jamaluddin, Selaku Staff Lapangan TPA Terjun pada tanggal 06 Februari 2024. Yaitu yang berkaitan dengan sumber daya manusia beliau mengatakan di TPA sudah memadai dalam segi hal apapun seperti sarana dan prasarana yang cukup maksimal baik dan tata kelola nya. Dinas lingkungan hidup terus melakukan pembenahan terhadap TPA tidak hanya merubah sistem pengelolaan sampahnya saja, tetapi merubah kawasan tersebut menjadi lebih rapi dan menarik untuk dikunjungi masyarakat.

Hasil wawancara berikutnya dengan Bapak Junaidi untuk meningkatkan kinerja Sumber Daya Manusia kesadaran masyarakat terhadap kebijakan sampah, baik didaerah maupun di pusat akan membantu dalam upaya pengelolaan sampah. Dengan pengelolaan sistem bank sampah ini di harapkan mampu membantu pemerintah dalam menangani sampah dan meningkatkan ekonomi masyarakat.

Wawancara selanjutnya dengan Ibu Dara Putri berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) di TPA apakah sudah menjalankan dengan baik dalam implementasi kebijakan, menurut bapak Jamaluddin sudah baik, tapi seharusnya lebih ditingkatkan SDMnya sesuai dengan Dinas Lingkungan Hidup.

Berikutnya dengan Bapak Zulkifli yang mengatakan SDM yang ada di TPA seperti sarana prasarana cukup memadai, sehingga masyarakat sudah tidak lagi membuang di sungai karna sesuai dengan prosedur arahan dari Dinas Lingkungan Hidup.

Dengan demikian, kesimpulan dari hasil wawancara terhadap narasumber diatas adalah Sumber Daya Manusia yang ada di TPA sudah dalam kategori memadai dalam artian bahwa sumber daya manusia yang ada di TPA ini sudah lengkap dan sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. SDM yang ada di TPA Marelan sudah efektif, dari segala aspek Dinas Lingkungan Hidup juga sudah memberikan kemampuan secara optimal untuk kebersihan, dan juga kenyamanan kepada masyarakat yang ada di lingkungan sekitar.

4.2.3 Adanya Disposisi Dalam Pengelolaan Persampahan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap Ibu Dara Putri, Selaku Sekretaris Kantor TPA Terjun pada tanggal 07 Februari 2024. Berkaitan dengan disposisi beliau mengatakan bahwa sistem yang ada di TPA sudah berjalan dengan efektif, masyarakat harus memahami cara membuang sampah yang baik agar sampah tidak menjadi acuan setiap manusia dan mengurangi volume sampah.

Hasil wawancara berikutnya dengan Bapak Zulkifli mengatakan setiap kegiatan yang ada di TPA kepala TPA pastinya akan mendisposisikan kepada bidangnya masing-masing. Misalnya seperti pemulung dengan cara memilah sampah-sampah disaat pembuangan sampah berlangsung, itu dapat mengganggu pekerja yang bertugas. Dalam artian kalau sudah disposisi sesuai dengan arahan barulah pemulung bisa memilah sampah yang mereka ingin jual, maka kami dari TPA sudah ingin tidak ada pemulung tetapi jika kami melarangnya mereka bisa tidak mendapatkan pekerjaan ataupun tidak menghasilkan uang.

Wawancara selanjutnya Bapak Jamaludin berkaitan dengan evaluasi disposisi di TPA setiap bulannya mengalami kenaikan sampah yang dikelola, jika sistem yang digunakan open dumping akan mengalami kumuh bau tidak sedap. Tetapi karna sistem yang digunakan saat ini sudah sanitary landfill berbeda maka masyarakat pun ikut berkerja di TPA.

Berikutnya Dengan Bapak Junaidi yang mengatakan disposisi di TPA selalu mengalami peningkatan tentang sampah, sering terjadi kericuan antara pemulung dengan pemulung lainnya karena memilah sampah.

Dengan demikian, kesimpulan dari hasil wawancara terhadap diatas terkait disposisi yaitu, ada yang sudah berjalan dengan baik tetapi masih terdapat hambatan dilapangan. Dikarekan banyak pemulung yang memilah sampah tidak mengikutin prosedur atau arahan yang diberikan oleh kepala TPA. Jadi, pelaksanaan disposisi menjadi sedikit terhambat dan tidak dapat berjalan dengan cepat.

4.2.4 Adanya Struktur Birokrasi Tentang Pengelolaan Persampahan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap Bapak Junaidi, Selaku Staff Keamanan TPA Terjun pada tanggal 08 Februari 2024. Berkaitan dengan struktur birokrasi beliau mengatakan, bahwa Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan pembagian tugas seperti penghijauan dan pemeliharaan dilingkungan TPA sampah, pengelolaan sampah dan air lindi, yang bertugas menyelesaikan masalah pengelolaan sampah di kota medan.

Hasil wawancara dengan Ibu Dara Putri berikutnya mengatakan sistem penjadwalan petugas di TPA yaitu jam operasional yang berbeda-beda setiap supir yang mengangkut keluar masuk nya truk sampah. Supir terbagi 2 shift dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam, setiap supir hanya diperbolehkan mengangkut sampah hanya sekali trip tidak boleh lebih dari sekali. Dalam satu truk harus dicatat dan ditimbang dengan petugas penimbang agar mengetahui jumlah volume sampah yang masuk ke TPA setiap harinya.

Laporan Hasil Timbangan												
Dari Tgl 31/01/2024 s/d Tgl 31/01/2024												
Tanggal Cetak : Friday, 01-03-2024												
No. Seri	No. Polisi	Nama Relasi	Produk	Berat Timbang	Berat Timbang	Berat Netto	Tanggal	Jam Masuk	Jam Keluar	Penimbang	Nama Supir	
102476	BK 9921 J	MEDAN MARELAN	TYPPER	3,600	6,070	2,470	31-01-24	13:18	13:18	HENDRA	MISDI	
102591	BK 9682 J	MEDAN MARELAN	ARMROLL	3,990	6,790	2,800	31-01-24	18:19	18:19	HENDRA	ZAINUDDIN LUBIS	
102556	BK 9682 J	MEDAN MARELAN	ARMROLL	3,990	6,670	2,680	31-01-24	15:29	15:29	HENDRA	ZAINUDDIN LUBIS	
102544	BK 9211 J	MEDAN MARELAN	TYPPER	3,900	5,410	1,510	31-01-24	15:02	15:02	HENDRA	PURNAMA	
102503	BK 9655 J	MEDAN MARELAN	TYPPER	3,900	5,060	1,160	31-01-24	13:58	13:58	HENDRA	M RONI	
102439	BK 9220 J	MEDAN MARELAN	TYPPER	3,900	4,980	1,080	31-01-24	11:59	11:59	SITI	HENDRI F	
102428	BK 9655 J	MEDAN MARELAN	TYPPER	3,900	5,910	2,010	31-01-24	11:14	11:14	SITI	M RONI	
102330	BK 9669 J	MEDAN MARELAN	CONV KECIL	5,550	10,300	4,750	31-01-24	9:38	9:38	SITI	EKO ISWANTO	
102308	BK 9220 J	MEDAN MARELAN	TYPPER	3,900	5,780	1,880	31-01-24	9:03	9:03	SITI	HENDRI F	
102297	BK 9414 J	MEDAN MARELAN	CONV BESAR	9,200	14,920	5,720	31-01-24	8:40	8:40	SITI	ARDIANSYAH	
102296	BK 9606 J	MEDAN MARELAN	CONV BESAR	9,250	14,920	5,670	31-01-24	8:40	8:40	SITI	JAMIL	
				55,080	86,810	31,730						

Wawancara selanjutnya Bapak Zulkifli berkaitan dengan kerja sama dengan pihak lain yaitu tidak ada yang dijalin kerja sama dengan TPA lainnya, dahulu ada jalinan kerja sama dengan TPA Namo Bintang tetapi saat ini sudah tidak lagi dipergunakan karna

memiliki lahan yang sedikit. Saat ini TPA terjun yang menjadi satu-satunya TPA di Kota Medan yang menjadi tempat pembuangan sampah.

Berikutnya dengan Bapak Jamaludin mengenai struktur birokrasi mengenai struktur ini masih ada yang kurang antara jalinan kerja sama, dan struktur organisasi yang belum terlaksana.

Dengan demikian, kesimpulan dari hasil wawancara terhadap narasumber diatas adalah struktur birokrasi dalam pengelolaan sampah di TPA sudah mempunyai bagian-bagiannya masing-masing dan semua bagian sudah mempunyai tugas pokok dan fungsinya untuk menyelesaikan masalah yang ada di TPA Terjun marelan.

4.3 Pembahasan

Berdasarkan uraian penyajian diatas, maka dalam pembahasan sub bab ini merupakan kajian atau analisis data hasil wawancara dengan para narasumber di TPA Terjun Marelان. Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian tersebut. Adapun analisis terhadap hasil wawancara yang penulis sajikan adalah sebagai berikut :

4.3.1 Adanya Komunikasi Tentang Pengelolaan Persampahan

Menurut Teori George C. Edward III dalam Agustino, (2006:149) yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan komunikasi merupakan faktor pertama yang mempengaruhi keberhasilan dalam suatu program pengelolaan, sosialisasi sangat menentukan suatu keberhasilan dalam pencapaian tujuan dari program pembangunan, yaitu dengan memberikan suatu gagasan terkait dengan program yang akan dijalankan kepada masyarakat luas agar lebih memahami maksud dan

tujuannya. Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat juga dapat mempererat hubungan antara masyarakat dengan pihak yang memberikan sosialisasi, semakin dekat hubungan yang terjalin maka semakin mudah pula proses sosialisasi berlangsung.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diperoleh dan dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian sosialisasi yang dilakukan oleh Kepala TPA Terjun Marelان dengan masyarakat sudah dilaksanakan. Sosialisasi dilakukan dengan melalui kerja sama antara perangkat desa seperti lurah dan juga kepala desa untuk memperluas jangkauan pemahaman tentang program pengelolaan sampah atau pengambilan sampah kepada masyarakat disetiap rumah. Melalui sosialisasi masyarakat harus memilah sampah yang benar agar tidak menjadi penyakit bagi lingkungan di sekitar. Namun, penulis mendapati masih banyak masyarakat di TPA yang belum mengetahui cara mengelolah bank sampah ini agar mendapatkan penghasilan yang bagus. Kebiasaan hal buruk yang dilakukan masyarakat membuang sampah di sembarang tempat seperti sungai atau pun dipinggiran jalan seperti lahan kosong.

Dapat disimpulkan bahwa Komunikasi dalam mencapai tujuan dari Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penerapan Larangan Dalam Pengelolaan Persampahan Di Kota Medan. Kepala TPA sudah memberikan informasi dan komunikasi yang cukup optimal, namun harus lebih ditingkatkan lagi mengenai informasi dan sosialisasi-sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat secara menyeluruh, sebab masih kurangnya kesadaran dari masyarakat mengenai sampah dan cara membuangnya sembarangan.

4.3.2 Adanya Sumber Daya Manusia Tentang Pengelolaan Persampahan

Faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya, merupakan George C. Edward III dalam Agustino (2006:151) dalam mengimplementasikan kebijakan sumber daya terdiri dari beberapa elemen yaitu: Staf, Informasi, dan Fasilitas

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam melaksanakan kebijakan publik tanpa dukungan sumber daya, kebijakan hanya akan menjadi dokumen yang tidak terwujud untuk memberikan pemecahan masalah yang ada di masyarakat, atau upaya memberikan pelayanan pada masyarakat.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan narasumber dapat disimpulkan bahwa penelitian Sumber Daya Manusia yang ada Di TPA Terjun Marelan sudah memadai, untuk peningkatan kinerja kepala TPA harus mempunyai pelatihan-pelatihan khusus untuk anggota yang ada di TPA Terjun agar pengelolaan sampah bisa dikelola lebih baik lagi. TPA Terjun Marelan juga sudah memberikan kemampuan secara optimal untuk keamanan dan juga kebersihan kepada masyarakat yang ada di Kota Medan.

4.3.3 Adanya Disposisi Dalam Pengelolaan Persampahan

Faktor ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik bagi George C. Edward III dalam Agustino (2006:152), adalah disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika

pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Hal yang perlu dicermati pada variable disposisi adalah. Pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan lebih khusus lagi pada kepentingan warga.

Disposisi di TPA Terjun Marelan saat ini sudah mempunyai evaluasi setiap bulannya, maka dari itu Kepala TPA Terjun menggunakan air lindi agar tidak mengganggu masyarakat dan merubah sistem yang lebih baik mengenai kelembapan sampah, hal tersebut sudah tepat dan tidak perlu diragukan lagi hanya implementasi di lapangannya saja bagaimana Dinas Lingkungan Hidup dapat merangkul masyarakat agar dapat mengikuti aturan yang sudah ada.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui, bahwa penelitian Disposisi yang ada di TPA Terjun Marelan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dan sudah berjalan dengan efektif karena sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, namun terdapat arahan dari bapak walikota Medan, yang mana disposisi di TPA boleh berkolaborasi, berkerjasama dengan bidang lain untuk menyelesaikan masalah yang ada di TPA Terjun Marelan walaupun bukan dibidangnya tetapi berkolaborasi dapat menyelesaikan masalah dengan cepat. Jika dilihat dari sisi pemerintahan akselerasi percepatan setiap persoalan

harus dapat diselesaikan dengan baik dan dengan solusi yang tepat tanpa adanya masalah.

4.3.4 Adanya Struktur Birokrasi Tentang Pengelolaan Persampahan

Menurut George C. Edward III dalam Agustino, (2008:153) yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia maka hal ini akan menyebabkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Dua karakteristik yang dapat membantu kinerja struktur birokrasi/ organisasi kearah yang lebih baik

Struktur birokrasi merupakan kewenangan yang melekat pada posisi/strata kelembagaan atau individu sebagai pelaksana kebijakan. Karakteristik utama dari birokrasi umumnya tertuang dalam prosedur kerja atau Standard Operating Procedures (SOP) dan Fragmentasi organisasi.

Berdasarkan hasil dari wawancara bahwa penelitian dalam struktur birokrasi yang sudah efektif sistem penjadwalan yang cukup bagus dan melaksanakan tugas dan fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup yang sesuai peraturan. Namun Pengelolaan sampah ini tidak ada kerjasama yang dilakukan dengan TPA lain, hal ini menjadi sampah yang semakin banyak dan masyarakat terkadang membakarnya di area TPA.

Dari kategorisasi hasil penelitian dapat ditetapkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penerapan Larangan Dalam Pengelolaan Persampahan Di kota Medan sudah terimplementasi. 1) sosialisasi bahwa berjalan dengan baik, namun karena masih kurangnya kesadaran masyarakat dengan cara membuang sampah. 2) sumber daya manusia nya sudah memadai tetapi lebih di tingkatkan kinerja atau pun pelatihan-pelatihan yang ada. 3) disposisi yang dijalankan cukup baik. 4) belum berjalan dengan baik masih kurangnya struktur organisasi.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penerapan Larangan Dalam Pengelolaan Persampahan Di kota Medan sudah terimplementasi namun belum berjalan cukup baik. Hal ini didasarkan pada:

1. Dalam rangka Pengelolaan Sampah Di Kota Medan, Kepala TPA sudah memberikan informasi dan komunikasi yang sangat optimal, namun harus lebih ditingkatkan lagi mengenai informasi dan sosialisasi-sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat secara menyeluruh, sebab masih kurangnya kesadaran dari masyarakat membuang sampah sembarangan yang tidak menerapkan etika dan toleransi yang baik.
2. Sumber Daya Manusia yang ada Di TPA Terjun Marelان sudah memadai, untuk peningkatan kinerja sumber daya manusia Dinas Lingkungan Hidup mempunyai pelatihan-pelatihan khusus untuk anggota yang ada di TPA Terjun Marelان. Dari segala aspek, Kepala TPA juga sudah memberikan kemampuan secara optimal untuk keamanan dan juga kebersihan kepada masyarakat yang ada di Kota Medan.
3. Disposisi yang ada di TPA Terjun Marelان sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dan sudah berjalan dengan efektif karena sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, namun terdapat arahan dari bapak walikota Medan,

disposisi di TPA boleh berkolaborasi, berkerjasama dengan bagian lain untuk menyelesaikan masalah yang ada di TPA Terjun Marelan walaupun bukan dibidangnya tetapi tidak ada berkolaborasi karena TPA Namo Bintang sudah tidak operasional lagi. Jika dilihat dari sisi pemerintahan akselerasi percepatan setiap persoalan harus dapat diselesaikan dengan baik dan dengan solusi yang tepat tanpa adanya masalah.

4. Struktur Birokrasi mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam pengelolaan sampah di TPA Terjun Marelan dilihat kurangnya struktur organisasi yang di jalankan oleh bidangnya, namun dari rincian tugas dan fungsi lainnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan yang sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Rincian Pengelolaan Sampah Di Kota Medan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dan uraian yang telah dijelaskan maka penulis memberikan saran dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penerapan Larangan Dalam Pengelolaan Persampahan Di Kota Medan. Adapun beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Kepala TPA Terjun Marelan untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi seperti :

1. Agar TPA Terjun Marelan dapat meningkatkan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat tidak membuang sampah sembarang tempat agar dapat memberikan dampak yang jauh lebih baik dalam peningkatan kebersihan di Kota Medan.

2. Agar TPA Terjun Marelان dapat lebih melakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar pelaksanaan pengawasan berjalan secara optimal. Pada hakikatnya, sumber daya manusia adalah pemikir, penggerak dan perencana untuk mencapai tujuan dan kunci yang menentukan perkembangan. Selain membutuhkan kuantitas, kualitas menjadi salah satu faktor yang juga mempengaruhi dalam menjalankan proses pengelolaan sampah yang optimal.


DAFTAR PUSTAKA

- Wahab,S,A. (2019). *Analisis Kebijakan & Implementasi Dalam Pendidikan Islam*. Jakarta: Pancawahana.
- Hajar, N. K. D. S., Amrizal, D., Izharsyah, J. R., & Mahardika, A. (2022). *Perencanaan Pembangunan & Pembuatan Kebijakan Daerah: Dari Teori Ke Praktik* (Vol. 1). umsu press.
- Guntur. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugroho,F. (2020). *Studi Penerapan Bank Sampah Dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Kota Yogyakarta.
- Mulyadi. (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan. *JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia*, 2(2), 92-101.
- Mustopadidjaja, M. (2020). *Reformasi Hubungan Kepemimpin Birokrasi Dalam Percepatan Pelayanan Publik*. Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik.
- Dwijowijoto. (2022). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI PROGRAM BANK SAMPAH*. Bone Bolango: Administrasi dan Pelayanan Publik.
- Tachjan. (2018). *Fenomena Kebijakan Publik Dalam perspektif Administrasi Publik Di Indonesia*. Jakarta: CV. Dharma Persada.
- Adisasmitta. (2019). Pengenalan pengolahan sampah botol plastik sebagai bahan baku energi alternatif. *TEKMULOGI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 93-102.
- Notoatmodjo, S., & Aprilia, Y. T. (2018). *Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Terhadap Pemilihan Alat Kontrasepsi Jangka Panjang Pada Wanita Usia Subur (WUS) di Wilayah Kerja Polindes Kefa Utara Kab. TTU PROV. NTT Tahun 2018*. Jurnal Untuk Masyarakat Sehat (JUKMAS).
- Martinelli, I. (2021). *Menilik Financial Technology (Fintech) dalam Bidang Perbankan yang dapat Merugikan Konsumen*. Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi).

- Agustino. (2016). *TINJAUAN NORMATIF PENERAPAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB PRODUSEN DALAM PENGATURAN TATA KELOLA SAMPAH PLASTIK DI INDONESIA*. Bina Huk. Lingkung.
- Salim, & Sucipto. (2021). *Pengelolaan Sampah Organik Menjadi Pupuk Kompos*. *An-Nizām: Jurnal Bakti Bagi Bangsa*, 1(2), 20-28.
- Purwanto, A. &. (2019). *Analisis Kebutuhan Pengembangan Bahan Ajar Digital Matakuliah Geofisika Berbasis Platform Lms Moodle Untuk Menunjang Implementasi*. *Jurnal Kumparan Fisika, Kurikulum Mbkm*.
- Amrizal, D., & Yusriati, Y. (2019). *Upaya Meningkatkan Produktivitas Tanaman Ubi Kayu Melalui Teknik Budidaya Dan Penerapan Model Penyuluhan Kelompok Tani Terbatas Di Desa Baru Titi Besi*. *JURNAL PRODIKMAS Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 1-5..

DOKUMENTASI





MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JMSU Akreditasi Unggul Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/BACEAL-PT/TKK/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Sukhtar Basri No. 3 Medan 20228 Telp: (061) 6622400 - 66224567 Fax: (061) 6622474 - 6621003
 Email: info@umsu.ac.id ** fkip@umsu.ac.id ** umsamedan umsamedu umsamedn umsamedn

Sk-1

PERMOHONAN PERSetujuan
JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth. Bapak/Ibu
Program Studi ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 30 Agustus 2023

Assalamu 'alainku wa, w.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama Lengkap : EKA LESTARI
 N P M : 1803100072
 Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
 SKS diperoleh : 142 SKS, IP Kumulatif : 3,43

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2015 tentang Penerapan Larangan dalam pengeluaran persampahan di Kota Medan.	<i>[Signature]</i>
2	Implementasi Peraturan daerah nomor 16 tahun 2011 tentang Kawasan terdampas Lalu Lintas di Jl. Gmpt Subroto	
3	Implementasi peraturan daerah nomor 7 tahun 2002 tentang retribusi Pelayanan Parkir Di tepi jalan dan perizinan Pelataran Parkir Kota Medan.	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

- Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
- Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Program Studi:
Diteruskan kepada Dekan untuk Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tanggal 30 Agustus 2023

Ketua
Program Studi ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

[Signature]

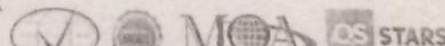
(... ANANDA MAHARDIKA, M.Si, M.P. ...)
NIDN: 062

Pemohon,
[Signature]
(... EKA LESTARI ...)
Dosen Pembimbing yang ditunjuk
Program Studi ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

[Signature]

(... IDA MARTINELLY, S.H., M.M. ...)
NIDN: 062

PB: IDA MARTINELLY S.H.MM





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Adress: Gedung Bersejarah Kerdasari Jalan Merdeka No. 12050 Medan, Sumatera Utara
 Pusat Administrasi: Jalan Muhtar Basri No. 3 Medan, 20228 Telp. (061) 622300 - 6224587 Fax. (061) 6225474 - 6831982
 Email: info@umsu.ac.id | fkip@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
 DAN PEMBIMBING**
 Nomor : 1645/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2023

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 30 Agustus 2023, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **EKA LESTARI**
 N P M : 1803100072
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : X (Sepuluh) Tahun Akademik 2022/2023
 Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENERAPAN LARANGAN DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI KOTA MEDAN**

Pembimbing : **IDA MARTINELLI, S.H., M.M.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana teruang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 061.18.310 tahun 2023.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 30 Agustus 2024.

Ditetapkan di Medan,
 Pada Tanggal, 16 Saffar 1445 H
 02 September 2023 M

Dekan,

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP,
 NIDN. 0030017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.





UMSU
Unggul | Berani | Berprestasi

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1911/SK/BAN-PT/AK/PD/13/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20235 Telp. (061) 6823400 - 6823467 Fax. (061) 6825474 - 6811995
@umsumedan @fisip@umsu.ac.id @umsu.ac.id @umsu.ac.id @umsu.ac.id @umsu.ac.id

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Sk-3

**PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Kepada Yth.

Medan, 04 Oktober 2023

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : EKA LESTARI
N P M : 1303100072
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor. 1234 /SK/IL.3.AU/UMSU-03/F/20 21. tanggal 30 Agustus 2023 dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG PENERAPAN LARANGAN DALAM PENGELOLAAN PERGAMPAHAN
DI KOTA MEDAN.

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM (Transkrip Nilai Sementara) yang telah disahkan;
4. Foto Copy Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam*.

Menyetujui :

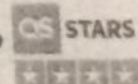
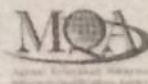
Pembimbing

(IDA MARTINELI, SH., M.M.)

NIDN:

Pemohon,

(EKA LESTARI)

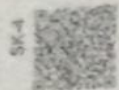




UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

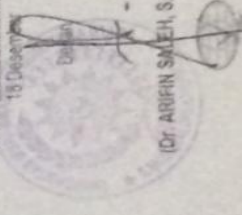
Nomor : 2155/UND/II.3.AJUM/SU-03/F/2023

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Hari, Tanggal : Rabu, 23 Desember 2023
 Waktu : 10.00 Wib s/d Selesai
 Tempat : Ruang Laboratorium FISIP UMSU
 Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.

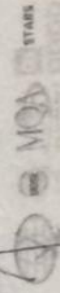



No	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
1	ENI LESTARI	1803100072	RAFIEGAH NALAR RIZKY, S.Soc. M.A	IDA MARTINELLI S.H. M.M	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG FENEPAPRI LARANGAN DALAM PENGELOAAN PERGAMPAHAN DI KOTA MEDAN
2	KHADIAH ULFA	1903100033	Dr. JEHAN RICH ZHARSYAH, S.Soc. M.Si.	RAFIEGAH NALAR RIZKY, S.Soc. M.A	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DALAM PELAYANAN ADMINISTRATIF DI KANTOR CAMAT HIRI KIRI KECAMATAN SECANGANGNY KABUPATEN LANGKAT
3	SUPAN SARI MUNTJE	1903100036	IDA MARTINELLI S.H. M.M	SYAFRUDDIN, S.Soc. M.H	STRATEGI ORGANIZING DALAM PENGELOAAN WISATA AIR TERJAN RUPES DESA JALUK KABUPATEN ACEH TENGAH
4	ZUKHSA FATHISA	1803100003	SYAFRUDDIN, S.Soc. M.H	IDA MARTINELLI S.H. M.M	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERONG BEGANG NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOAAN OBLIK WISATA PESISIR PANTAI DAN SUNGAI DI KABUPATEN SERONG BEGANG
5	MUHAMMAD DICRYANSHORI	1803100045	RAFIEGAH NALAR RIZKY, S.Soc. M.A	SYAFRUDDIN, S.Soc. M.H	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG TUGAS DAN FUNGSI KARANG TARUNA DI KOTA MEDAN

Medan, 05 Desember 2023
 18 Desember 2023



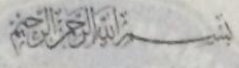
(DR. ANINDA MAHARDIKA, S.Soc., MSP.)




MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIRIPYAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PERPUSTAKAAN

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 58/2014, AP-PT/2012
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66234567
Telp. (061) 66234567 | Email: perpustakaan@umsu.ac.id | PPT@perpustakaan@umsu.ac.id | www.perpustakaan.umsu.ac.id

SURAT KETERANGAN
 Nomor: 03214/KET/IL-9-AU/UMSU-P/M/2023

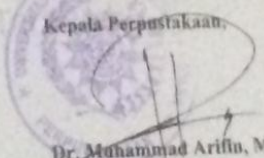



Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : EKA LESTARI
NPM : 1803100072
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan/ P.Studi : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 4 Rabiul Awal 1445 H
 19 September 2023 M
 Kepala Perpustakaan,

 Dr. Muhammad Arifin, M.Pd.


UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BA-PT/AK/KP/PT/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6822400 - 65234567 Fax. (061) 6825474 - 6831953
<http://web.fkip.umsu.ac.id> fkip@umsu.ac.id fkip@umsu.ac.id @umsuimedan @umsuimedan @umsuimedan @umsuimedan

Nomor : 99/KET/IL3.AU/UMSU-03/F/2024
 Lampiran : --
 Hal : *Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa*

Medan, 04 Rajab 1445 H
 16 Januari 2024 M

Kepada Yth : **Kepala TPA Marcellan**
di-

Tempat.



Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr Wb


Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama Mahasiswa : **EKA LESTARI**
 N P M : 1803100072
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : XI (Sebelas) Tahun Akademik 2023/2024
 Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENERAPAN LARANGAN DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI KOTA MEDAN**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan *terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Dekan,


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.
 NIDN. 0030017402


 Ce - File

DRAFT WAWANCARA

**JUDUL : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6
TAHUN 2015 TENTANG PENERAPAN LARANGAN DALAM
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI KOTA MEDAN**

1. Adanya komunikasi tentang pengelolaan persampahan
 - a. Apakah terdapat program sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah di kota medan?
 - b. Apa saja bentuk sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah di kota medan ?
 - c. Apa saja kendala dalam penyampaian informasi tentang larangan pengelolaan sampah di kota medan ?
2. Adanya sumber daya manusia tentang pengelolaan persampahan
 - a. Apakah sumber daya manusia di TPA sudah memadai dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah ?
 - b. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia di TPA ?
 - c. Apakah pegawai / SDM yang ada di TPA sudah menjalankan tugasnya secara maksimal dalam pengelolaan sampah ?
3. Adanya disposisi dalam pengelolaan persampahan
 - a. Apakah sistem disposisi di TPA sudah berjalan dengan efektif ?
 - b. Bagaimana pengawasan dan pengendalian dalam sistem pengelolaan sampah ?
 - c. Apakah terdapat evaluasi terkait disposisi di TPA setiap bulannya ?
4. Adanya struktur birokrasi tentang pengelolaan persampahan
 - a. Apakah ada pembagian tugas yang dilakukan pimpinan dalam pengelolaan sampah di TPA ?
 - b. Bagaimana cara sistem penjadwalan petugas pengelolaan sampah ?
 - c. Apakah ada kerja sama yang dilakukan dengan pihak lain dalam pengelolaan sampah ?



BERTAKWAH BERSAMA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap: **EKA LECTIA**
 NPM: **4103100072**
 Program Studi: **ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**
 Judul Skripsi: **IMPLEMENTASI PERATURAN ORBAMA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PENYARAFAN LAFANGAN DALAM PENGOLAHAN PERGAJIBAHAN DI KOTA MEDAN**

No.	Tanggal	Kegiatan Advise Bimbingan	Pasal Pembimbing
1	07/09/2023	Bimbingan proposal skripsi bab 1-3	1
2	14/09/2023	Revisi latar belakang, manfaat penelitian, tujuan tesis, kerangka konsep	2
3	29/09/2023	Revisi kategorisasi	2
4	05/10/2023	Acc proposal skripsi	1
5	05/01/2024	Bimbingan Draft wawancara	1
6	10/01/2024	Revisi Draft wawancara	2
7	15/05/2024	Bimbingan skripsi, Bab II	2
8	18/05/2024	Bimbingan Bab IV, Bab III	2
9	20/05/2024	Acc Draft	2

Medan, 20 Mei 2024

(Signature)
 Dr. Anisa Salsabila, S.Pd., M.Pd., M.Si
 NIDN 0030817402

Ketua Program Studi,
(Signature)
 ANNINDYAH MURNIDITA, S.Si, M.Pd.
 NIDN 0022469101

Pembimbing,
(Signature)
 LIDA MARIANTELLEH, S.M.
 NIDN 0008026402



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI
Nomor : 863/UND/III.3.AU/UMSU-03/F/2024

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Kamis, 30 Mei 2024
Waktu : 08.15 WIB s.d. Selesai
Tempat : Aula FISIP UMSU LL 2

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TMI PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	THASYA ARSETYA	2003100024	IDA MARTINELLY, SH, MM	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	Dr. JEHAN RIDHO IZHAR SYAH, S.Sos., M.Si.	FUNGSI DIRECTING SATPOL PP DALAM PENATAAN DAN PENGAWASAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN DELI SERDANG
2	EKA LESTARI	1803100072	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	KHAIDIR ALI, S.Sos., M.PA.	IDA MARTINELLY, SH, MM	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENERAPAN LARANGAN DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI KOTA MEDAN
3	FAIZA STEVANI	2003100049	IDA MARTINELLY, SH, MM	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEDOMAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KANTOR CAMIAT HATONDUHAN KABUPATEN SIMALUNGUN
4	ALVITA SAHRIANI	2003106057	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PELATARAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI KOTA MEDAN
5	NEYS	2003150042	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	PERAN PELAYANAN PARTISIPATIF DINAS KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN STUNTING DI KECAMATAN TELUK NIBUNG KOTA TANJUNG BALAI

Menulis Skrang:

Tanggal: 11 Mei 2024

Medan, 20 Dzulhijjah 1445 H
29 Mei 2024 M

Ditandatangani oleh:
Ketua Tim Pengujian
Prof. Dr. M. M. M. M. D. ARIFIN, SH, M.Hum

Ketua Tim Pengujian
Dr. ARIEF SAHEH, S.Sos., MSP.

Ketua Tim Pengujian
Pantia Ujian
Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.I.Kom

